KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Koordinasi Pemda-BGN: MBG diharapkan nihil kecelakaan
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Koordinasi Pemda-BGN

MBG Diharapkan Nihil Kecelakaan

PEMERINTAH mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Tata kelola program unggulan itu disempurnakan dengan harapan akan zero accident bisa tercapai.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, salah satu fokus utama dalam regulasi itu adalah penambahan Unit Pelaksana Teknis Badan Gizi Nasional (UPT BGN), berupa Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah. "KPPG bisa memenuhi kebutuhan ahli gizi dan mengawasi kinerja satgas MBG," ujarnya, kemarin.

Karena program MBG berjalan setiap hari, maka butuh pengawasan melekat, agar semua prasyarat untuk tidak terjadinya keracunan bisa sesuai target. Selanjutnya, BGN harus mencari solusi agar bisa memenuhi ketersediaan ahli gizi di setiap SPPG yang saat ini masih jadi tantangan karena akses yang belum merata, terutama di pelosok.

Irma meyakini, jika seluruh proses dijalankan sesuai SOP dan ketentuan hasil RDP antara DPR dengan BGN serta Kemenkes terkait gizi dan sanitasi, maka implementasinya akan lebih optimal. Pasalnya, lembaga lain seperti Kemendagri sudah berkomiten untuk membantu distribusi ke PAUD, ibu hamil, dan balita, serta BPOM terkait pangan aman. "Jika itu semua bisa dijalankan, Insya Allah target zero accident dapat dicapai," tandasnya.

Anggota Komisi IX Edy Wuryanto menambahkan, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memahami perannya masing-masing secara jelas. Perpres 115/2025 adalah langkah besar, tapi sukses atau tidaknya program ini, tetap bergantung pada kesiapan teknis di lapangan.

Menurutnya, harus ada kepastian bahwa percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan. Regulasi ini telah memuat sejumlah hal terkait untuk menyempurnakan tata kelola program ini.

Soal bahan baku, disebutkan bahwa asalnya harus dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lain, agar bisa menggerakkan perekonomian


IG PRIBADI

Irma Suryani

rakyat. Edy setuju dengan norma itu, dan mendorong penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG. Karena itu sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah.

Selama ini, lanjutnya, peningkatan kebutuhan bahan baku akibat SPPG tidak diimbangi suplai yang memadai. Karena itu, koordinasi antara Pemda dan BGN menjadi sangat krusial. BGN tahu kebutuhan SPPG, sementara Pemda tahu kapasitas suplai di wilayahnya. "Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG," tegas legislator Fraksi PDIP itu.

Untuk memenuhi poin itu, solusi paling strategis saat ini adalah mendorong adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara SPPG dan kelompok tani, peternak, nelayan, serta supplier lokal yang difasilitasi Pemda. Pasalnya, BGN belum tentu bisa mengatur supply secara optimal tanpa peran Pemda.

Poin penting selanjutnya adalah soal peran strategis ahli gizi dalam SPPG, terutama terkait keamanan dan kualitas makanan. Disebutkan, dapur wajib memiliki ahli gizi, tapi karena keterbatasan yang ada saat ini, ahli gizi di SPPG bisa berasal dari sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, hingga sarjana keamanan pangan.

Edy mengingatkan, ahli gizi adalah profesi kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebut, tiap profesi kesehatan harus bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya. Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi.

Dengan norma baru dalam menjalankan Program MBG, Edy berharap program ini bisa jadi pedoman bagi penyelenggara. Program unggulan ini harus ditopang oleh banyak pihak. Tujuannya, agar program yang memakan cukup besar anggaran Pemerintah ini dapat dirasakan masyarakat dengan lebih baik.

Sebelumnya, Rabu (3/12/2025) Pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai penanda dimulainya implementasi Perpres 115/2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, perpres itu mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan SPPG di wilayah 3T. BGN melaporkan, 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.

"Beberapa langkah lanjutan akan segera dijalankan, salah satunya sosialisasi masif di tingkat pusat dan daerah," ujar Zulkifli. ■ PYB